

BAB VI

KESIMPULAN-KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam kesimpulan-kesimpulan berikut tampak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kerjasama Indonesia – Jepang. Bagaimana upaya Indonesia dalam hal ini diajukan pula saran-saran.

VI.1. Kesimpulan-kesimpulan.

Beberapa kesimpulan yang bisa ditarik adalah sebagai berikut :

Kesimpulan Pertama.

Pertumbuhan ekonomi Jepang disebabkan oleh berbagai faktor baik yang berasal dari Jepang sendiri maupun yang berasal dari lingkungan internasional. Secara historis titik awal kemajuan Jepang dapat dilacak dari Restorasi Meiji. Restorasi Meiji yang pada dasarnya berarti pembukaan terhadap dunia luar (Barat) membuat Jepang berhasil mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi Barat tanpa merusak nilai-nilai budaya Jepang atau yang lebih dikenal dengan istilah *cultural borrowing*. Kemampuan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi itu tampaknya juga didukung oleh situasi budaya dan masyarakat Jepang yang relatif homogen, sehingga secara relatif juga kurang membawa dampak dialokasi sosial dibandingkan dengan proses modernisasi yang dilakukan oleh negara sedang berkembang lainnya. yang umumnya mempunyai ciri sebagai masyarakat yang heterogen dilihat dari sudut budaya dan etnik.

Di samping karakteristik di atas, patut juga untuk disebut nilai-nilai budaya masyarakat Jepang lainnya seperti disiplin diri yang tinggi, rajin, bermotivasi tinggi dan gemar menabung. Etos kerja yang demikian memberikan suatu nilai lebih bagi masyarakat Jepang untuk bersaing dengan negara-negara lainnya di tingkat internasional. Kemungkinan besar, mentalitas masyarakat Jepang tersebut disebabkan oleh kondisi alam Jepang, yaitu kesadaran bahwa mereka memiliki sumber-sumber alam yang terbatas dan oleh karenanya kerja keras merupakan suatu hal yang mutlak untuk dapat hidup dengan layak.

Sumberdaya manusia Jepang dikembangkan dengan memperbaiki dan memprioritaskan mutu pendidikan dasar dan menengah, sehingga keluaran pendidikan menengah sudah trampil dan siap-pakai. Kekurangan-kekurangan luaran pendidikan menengah itu diatasi dengan *in-house training* pada perusahaan-perusahaan yang

menampung mereka. Hal ini menyebabkan tenaga kerja trampil bisa memasuki pasar kerja pada usia lebih awal.

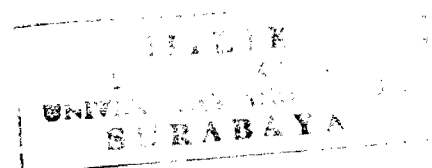
Faktor lainnya adalah kerjasama yang erat antara pemerintah dan usahawan Jepang yang dikenal dengan istilah *Japan Incorporated*. Melalui bentuk kerjasama demikian, pemerintah memberikan masukan-masukan yang sangat penting kepada pihak usahawan khususnya tentang pasar dan produk yang memberikan kemungkinan prospek paling menguntungkan. Selain itu, pemerintah Jepang memberikan perlindungan yang cukup besar bagi industri-industri Jepang dengan cara menerapkan tingkat proteksi yang cukup tinggi sehingga produk-produk ekspor dari negara luar sangat sukar untuk menembus pasar domestik Jepang.

Patut juga dicatat bahwa Peang Dunia I memberi momentum keberuntungan industri Jepang yang sedang mencari pasar. Merosotnya industri Eropah Barat akibat Perang Dunia I berkecamuk dan kebutuhan yang meningkat sekali akan piranti-piranti perang menjadikan industri Jepang bisa meningkatkan kapasitas industrinya. Setelah berakhirnya perang dunia kedua, maka dilihat dari aspek keamanan Jepang berada di dalam situasi yang menguntungkan karena negeri tersebut berada di bawah perlindungan Amerika Serikat. Perlindungan yang demikian telah memberikan peluang bagi Jepang, sebagai *free rider*, untuk lebih memusatkan diri pada persoalan persoalan ekonomi, sementara masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan diserahkan kepada Amerika Serikat. Selain itu, bantuan ilmu dan teknologi, penyediaan pasar dari Amerika Serikat, dan eskalasi perang di Semenanjung Korea dan Indocina menambah keberuntungan proses kemajuan ekonomi Jepang.

Kesimpulan Kedua.

Dilihat dari segi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Jepang, maka sesungguhnya pendudukan Jepang pada masa perang dunia kedua sangat sukar untuk dikaitkan dengan kebijakan pemberian bantuan pinjaman. Pada dasarnya masyarakat Jepang tidak mengenal nilai-nilai balas budi dan balas kasihan terhadap dunia luar. Pemberian bantuan pinjaman lebih ditekankan dari sudut kepentingan ekonomi Jepang. Kesimpulan seperti ini jelas terlihat dari struktur bantuan pinjaman Jepang yang mengalokasikan grant paling kecil jika dibandingkan dengan negara-negara industri lainnya. Bertolak dari nilai-nilai seperti ini adalah sukar untuk menuntut Jepang agar memberikan bantuan yang lebih besar kepada Indonesia dengan alasan dampak penjajahan pada masa perang dunia kedua. Sebaiknya, argumentasi yang dikemukakan adalah dari sudut kepentingan ekonomi timbal balik dan bukan dari sudut pertimbangan moral.

Melalui argumentasi kepentingan ekonomi timbal balik inilah kemungkinan



besar bantuan Jepang dapat ditingkatkan. Bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, yang sedikit banyak harus tergantung pada kesinambungan bantuan pinjaman, akan menguntungkan Jepang juga karena dengan keberhasilan pembangunan tersebut daya beli masyarakat Indonesia juga akan semakin besar untuk membeli produk ekspor Jepang. Terlebih lagi ketidak berhasilan pembangunan ekonomi Indonesia yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik akan tidak menguntungkan bagi Jepang karena, sedikit banyak, ketidakstabilan Indonesia akan mempengaruhi ketidakstabilan Asia Tenggara yang secara geostrategis sebagai wilayah yang sangat penting bagi Jepang. Di samping itu tentu saja perlu diberikan catatan bahwa terdapat beberapa kendala untuk meningkatkan bantuan tersebut.

Pertama, perubahan-perubahan sistem ekonomi ke arah yang lebih liberal di negara-negara sosialis seperti Cina, Uni Soviet dan Eropa Timur. Perubahan-perubahan ini telah mengakibatkan negara-negara di wilayah ini sedang dan tampaknya akan berusaha terus untuk memperoleh bantuan pinjaman yang lebih besar dari Jepang. Akibat situasi baru ini, muncul pesaing tambahan untuk memperoleh bantuan pinjaman yang lebih besar. Kedua, kecenderungan berlangsungnya apresiasi nilai yen terhadap dollar. Apresiasi nilai yen tersebut telah dan akan mengakibatkan jumlah utang yang harus dibayar oleh Indonesia kepada Jepang akan semakin besar karena mayoritas penerimaan ekspor Indonesia diperoleh dalam mata uang dollar. Dengan pertimbangan demikian, terdapat kesulitan dan beban yang sangat besar jika Indonesia bermaksud untuk meningkatkan bantuan pinjamannya kecuali diciptakan kesepakatan-kesepakatan, kebijakan-kebijakan baru dengan Jepang, serta penanganan yang bijak dan strategis bagi pembangunan Indonesia. Ketiga, mekanisme pembuatan keputusan di Jepang dalam hal alokasi bantuan pinjaman. Sampai saat ini, proses pembuatan keputusan tersebut tidak berada di bawah wewenang parlemen tetapi berada di bawah wewenang berbagai kementerian. Terlebih lagi, personil yang menangani pemberian bantuan tersebut sangat kecil. Akibatnya adalah tidak terhindarkannya perbedanaan yang sering terjadi antara besarnya komitmen bantuan yang telah ditetapkan dengan realisasi riil bantuan yang diberikan. Dengan kata lain, jumlah realisasi riil bantuan yang diberikan lebih kecil daripada komitmen yang telah dicanangkan sebelumnya. Keempat, munculnya kelompok-kelompok di Jepang yang menyatakan bahwa bantuan pinjaman kerap kali tidak mencapai sasaran bila dilihat dari kepentingan ekonomi Jepang. Kekecewaan itu kalau diekspresikan dalam pernyataan-pernyataan moral bahwa bantuan pinjaman yang diberikan kepada negara sedang berkembang tidak mengangkat taraf kehidupan masyarakat semakin baik karena bantuan pinjaman tersebut tidak mencapai sasaran masyarakat bawah. Kritik-kritik demikian paling tidak dapat merupakan kendala yang cukup besar bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan jumlah bantuan dari Jepang.

Kesimpulan Ketiga.

Di dalam masalah penanaman modal, Jepang tampaknya akan masih tetap

dapat meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia. Kecenderungan blok-blok perdagangan dan tidak dapat dihilangkannya proteksi non-tarif yang semakin tinggi telah mendorong Jepang untuk menggiatkan penanaman modalnya di luar negeri. Penanaman modal di luar tidak lagi hanya semata-mata dipandang karena pertimbangan tersedianya bahan baku dan tenaga kerja yang murah tetapi juga dalam upaya sebagai bagian dari strategi Jepang untuk menembus pasar internasional dan memindahkan industri menengahnya. Sekalipun demikian perlu ditambahkan bahwa Indonesia mendapat tantangan dari Cina, Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang berusaha untuk menarik penanaman modal Jepang untuk membangun perekonomian mereka. Akhirnya dapat jugalah disebutkan bahwa penyederhanaan proses birokrasi perlu dilakukan untuk mengundang lebih banyak penanam modal Jepang datang ke Indonesia.

Kesimpulan Keempat.

Dalam kaitannya dengan akses ke pasar Jepang, tampaknya belum banyak berubah. Produk ekspor Indonesia ke Jepang masih lebih didominasi oleh ekspornigas. Walaupun terdapat kecenderungan ekspor non migas Indonesia semakin meningkat namun dalam hubungan bilateral Indonesia – Jepang struktur ekspor Indonesia masih belum berubah, ekspor migas masih tetap merupakan porsi terbesar. Dalam kaitan ini, tampaknya Indonesia akan mendapat keuntungan jika Amerika Serikat berhasil mendesak Jepang agar lebih membuka pasarnya terhadap produk-produk asing, karena dengan demikian berarti pembukaan pasar yang lebih besar bagi produk ekspor Indonesia. Perlu juga diketahui walaupun terdapat pandangan bahwa Jepang dapat menggantikan posisi Amerika Serikat untuk menyerap ekspor negara-negara Asia namun kemungkinan tersebut untuk jangka pendek masih sukar untuk direalisasikan.

Kesimpulan Kelima.

Terdapat satu potensi yang besar di bidang pariwisata beriringan dengan kemajuan tingkat perekonomian Jepang. Kemakmuran yang semakin tinggi yang dinikmati oleh masyarakat Jepang memberikan peluang bagi mereka untuk mengadakan kunjungan ke negara-negara lain. Terlebih lagi, dengan adanya apresiasi nilai mata uang Yen biaya pariwisata yang dilakukan tersebut semakin murah bagi masyarakat Jepang. Namun, haruslah pula digaris bawahi bahwa terdapat kecenderungan orang-orang Jepang untuk bepergian ke luar negeri dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki orang Jepang sendiri. Mereka cenderung untuk bepergian menggunakan pesawat pesawat Jepang, makan di restoran Jepang dan menginap di hotel-hotel yang dimiliki oleh orang Jepang. Akibatnya nilai ekonomi dari pariwisata orang-orang Jepang ini juga sangat terbatas, kecuali dilakukan kesepakatan-kesepakatan

baru dengan pihak pengorganisir pariwisata Jepang.

Kesimpulan Keenam.

Secara formal, usaha untuk menghilangkan kecurigaan negara lain tentang kemungkinan banggunya militerisme dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan tetap mempertahankan pasal 9 konstitusi negara tersebut. Di samping itu tetap berusaha untuk mempertahankan limit anggaran pertahanan Jepang pada angka sekitar satu persen dari GNP. Juga, Jepang lebih menggunakan instrumen diplomasi dan kekuatan ekonomi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Akhirnya, berusaha untuk meningkatkan kerjasama kebudayaan dengan negara-negara yang pernah menderita pengalaman traumatis pada masa penjajahan Jepang, misalnya seperti program kunjungan mahasiswa ASEAN ke Jepang, atau program pelatihan bagi para pemuda ASEAN di Jepang. Dengan program sedemikian rupa Jepang berusaha untuk menanamkan citra bahwa Jepang secara militer bukan merupakan ancaman.

Sekalipun demikian, secara faktual negara ini sebenarnya telah melewati batas yang wajar dalam hal kemampuan militernya. Pengeluaran anggaran pertahanan telah melewati batas satu persen dari GNP (walau masih berada dalam angka sekitar satu persen), dan juga telah menetapkan batas keamanan wilayah Jepang sampai dengan 1000 mil yang berarti mencapai wilayah Asia Tenggara. Selain itu pantas dicatat bahwa walau pengeluaran anggaran pertahanan masih berada dalam angka sekitar satu persen dari GNP, namun karena GNP Jepang yang sangat besar maka sesungguhnya nilai riil anggaran pertahanan Jepang telah menduduki tempat ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Remiliterisasi Jepang tidak akan dilakukan selama kekuatan militer masih dianggap kurang efektif untuk mencapai tujuan utama (Negara Kaya!) yang bersifat ekonomik itu. Bila kekuatan ekonomi tidak lagi mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin Jepang akan menggunakan kekuatan militernya, apalagi syarat untuk itu sudah terpenuhi. Remiliterisasi akan sangat tergantung pada aliansinya dengan Amerika Serikat. Bila aliansi itu pecah dan tuntutan mencapai atau mempertahankan tujuan utama bangsa Jepang yang bersifat ekonomik itu menghendaki sarana kekuatan militer, Jepang tentu akan tidak segan membangun kekuatan militernya.

Kesimpulan Ketujuh.

Di samping kerjasama ekonomi yang selama ini telah berjalan secara bilateral antara Indonesia dengan Jepang dikembangkan kerjasama politik. Kerjasama politik ini ditekankan pada pemecahan-pemecahan masalah konflik regional yang ada di kawasan Asia Tenggara dengan melalui meja perundingan. Peran Jepang dalam peme-

cahan masalah ini sangatlah penting mengingat kekuatan ekonominya. Meski demikian perlu pula dicatat bahwa kerjasama politik ini, oleh Indonesia, dikelola untuk tidak mengurangi keutuhan dan persatuan ASEAN. Selalu dicegah supaya tidak sampai kerjasama politik pada tingkat bilateral ini menggoyahkan persatuan dan kesatuan ASEAN karena bagaimanapun ASEAN tetap merupakan prioritas yang cukup penting dalam skala prioritas politik luar negeri Indonesia. Karena itu bentuk kerjasama politik yang paling ideal dalam hal ini adalah bersifat informal, tidak terlembaga dan bersifat konsultatif.

Kesimpulan Kedelapan.

Sikap kehati-hatian tampak dalam mengantisipasi menguatnya potensi Jepang baik secara ekonomi, politik dan militer. Namun ini tidak berarti bahwa sikap cemas selalu diperlihatkan. Baik dengan atau tanpa sikap cemas yang diperlihatkan oleh Indonesia pun peran Jepang yang semakin besar di tingkat internasional tetap terus berjalan.

Kesimpulan Kesembilan

Tampaknya kemungkinan Jepang untuk mengalami perubahan politik yang drastis dalam waktu dekat ini sangat tipis. Bahkan walaupun misalnya pihak oposisi yaitu partai-partai di luar LDP semakin kuat pengaruhnya dan melebihi pengaruh LDP di parlemen namun sangatlah tipis kemungkinan bahwa Jepang dengan serta merta akan merubah kebijakan-kebijakan politiknya secara drastis. Hampir dapat dikatakan bahwa pengaruh usahawan-usahawan besar hampir terlihat di dalam seluruh partai, dengan kata lain tidak hanya di dalam LDP saja. LDP bisa bertahan sejak paruh kedua dasawarsa 1950-an disebabkan ia banyak menggantungkan dan didukung oleh para usahawan dari sektor moderen dan petani dari sektor tradisional. Akibatnya, walaupun terdapat pergeseran dominasi namun tidaklah berarti Jepang akan berubah secara drastis.

VI.2. Saran-saran.

Adapun saran-saran yang bisa ditawarkan adalah sebagai berikut :

Saran Pertama.

Bangsa Indonesia harus banyak belajar dari pengalaman bangsa Jepang, terutama dalam hal bagaimana bangsa itu membangun perekonomiannya. Tentu saja dalam belajar itu, bangsa Indonesia harus melihat perbedaan-perbedaan poleksosbudmil antara bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Walaupun bangsa Jepang memiliki keterbatasan sumberdaya alam, akan tetapi bangsa Jepang pun memiliki "kebe-

runtuntungan-keberuntungan” tertentu seperti sifat yang homogen dan bantuan IPTEK dan keamanan Amerika Serikat, sehingga bangsa Jepang relatif bisa melakukan cultural borrowing tanpa menanggung beban dislokasi sosial yang berat.

Saran Kedua.

Belajar dari keberhasilan Jepang, Indonesia harus terus berorientasi ekspor dan menumbuhkan kekuatan-kekuatan wiraswasta nasional tangguh sehingga mampu meningkatkan daya saing internasional. Meniru atau mencipta sendiri harus diarahkan untuk memenangkan kualitas produk sehingga bisa memasuki pasar internasional.

Saran Ketiga.

Berkait dengan saran kedua, Indonesia harus terus memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan nasional, terutama pendidikan dasar dan menengah, karena luaran tingkat pendidikan (terutama karena jumlahnya maupun masa produktifnya) inilah yang menjadi ”tulang punggung” pembangunan nasional Indonesia. Memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, jika berhasil, akan menghemat masa-didik dan menambah sumber tenaga kerja yang trampil dan siap-pakai.

Saran Keempat.

Belajar dari Jepang, maka perlu diperhatikan standar hidup ”tulang-punggung” perekonomian bangsa Indonesia. Seperti yang dilakukan pemerintah Jepang dan LDP yang menganak emaskan petani Jepang dengan menentukan harga besar. bangsa Indonesia harus mengusahakan supaya petani dan buruh yang menjadi tulang punggung ekonomi tradisional dan modern untuk memperoleh standar hidup yang lebih baik.

Saran Kelima.

Berkait dengan saran pertama dan kedua di muka, diperlukan pusat-pusat kajian Jepang di Indonesia yang didasarkan pada kebutuhan strategik bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menyediakan dana khusus untuk pusat-pusat kajian itu. Bila pusat kajian itu dibiarkan berkembang dengan mengandalkan bantuan dan tergantung secara finansial dari Jepang, maka akan muncul bias kepentingan yang bisa menggeser fungsi pusat-pusat kajian itu men”jadi” lobi-lobi kepentingan Jepang di Indonesia.

Saran Keenam.

Upaya mencari bantuan dan peningkatan penanam modal dari Jepang perlu diteruskan secara hati-hati dengan memperhatikan kesimpulan kedua di muka bahwa dalam ikhwal bantuan itu Jepang terutama tidak mengkaitkan bantuan dengan balas budi dan belas kasihan, tetapi perhitungan untung-melebihi-rugi. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia harus lebih banyak menyiasati agar bantuan yang diberikan oleh Jepang masuk dalam dan sesuai dengan strategi pembangunan bangsa Indonesia, bukan strategi bangsa Jepang. Pemerintah juga harus secara pragmatik mengendalikan bantuan itu sehingga kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkannya tidak boleh melebihi keuntungan-keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia. Apabila tidak dimanfaatkan secara baik, bisa jadi bantuan Jepang itu akan menjadi beban berat di kemudian hari, karena apresiasi mata uang Yen yang terus meningkat di dunia tentu memperberat beban membayar utang.

Saran Ketujuh.

Ekspor non migas Indonesia masih bisa memasuki pasar Jepang asal kualitas produk dan harga bisa bersaing dengan produk negara-negara lain. Untuk itu perlu ditingkatkan kendali mutu bagi produk-produk ekspor Indonesia. Selain itu Indonesia perlu mendukung upaya-upaya negara lain dan mencoba membuka pasar Jepang. Untuk ini diperlukan pula pendekatan dan penyuluhan pasar yang canggih di Jepang. Pusat-pusat studi Jepang seperti yang dimaksud pada saran keempat di muka haruslah tidak sekedar mengetahui bagaimana dan apa itu Jepang dan berhenti pada mengaguminya, tetapi perlu mendasarkan kebutuhan praktis dalam mencari akses-akses untuk memasuki pasar Jepang. Untuk ekspor ini tidak bisa tidak bangsa Indonesia harus bertindak secara aktif, bukan hanya pasif menunggu permintaan dari pihak luar saja, tetapi aktif membuka jaringan di Jepang untuk meningkatkan kemampuan Indonesia melihat setiap kemungkinan dan peluang pasar di Jepang.

Saran Kedelapan.

Yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana memanfaatkan secara maksimal peran Jepang yang semakin kuat tersebut demi kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal pariwisata, memang terdapat potensi yang kuat dari para turis asal Jepang. Akan tetapi mengingat sifat-sifat khas pengelolaan turisme Jepang, maka Indonesia tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dana sebagaimana diperoleh dari turis Barat.

Karena dalam pengembangan kepariwisataan ini Indonesia hanyalah sebagai tuan rumah yang tidak mungkin bisa memaksakan tamu, maka sebaiknya bangsa

Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Lebih baik berusaha terus memikat dan meningkatkan jumlah turis Jepang untuk datang ke Indonesia daripada mencoba merebut akomodasi dan transportasi yang dikelola perusahaan-perusahaan Jepang. Mengingat trauma Perang Dunia II cenderung ingin dilupakan oleh bangsa Jepang, maka seyogyanyalah iklim tentang pariwisata untuk orang-orang Jepang tidaklah pantas bila mengungkit-ungkit masa lalu Jepang di Indonesia, sebagaimana Wisata Nostalgia yang sering ditawarkan kepada bangsa Belanda.

